Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Dan Efektivitas Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Oleh:
MULTRIAN WOROSUASTI SAKINAH
21113185

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat salah satu jenisnya adalah pajak pertambahan nilai dengan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan uji t. Sebelum menggunakan analisis regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Kata Kunci : *Self Assessment System*, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesa-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP) Oyok abuyamin (2012:1). Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjukan keberhasilan pembangunan nasional, Penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan sumber penerimaan negara terbesar hal tersebut terbukti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2013, rencana penerimaan negara dari sektor pajak ditetapkan sebesar Rp. 995,2 triliun.merupakan rencana penerimaan dari PPN (Riski, Sifrid dan Harijanto:2014).

Pajak Pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut atau dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi (Suprianto,2011:16). Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara (Sukardji, 2000 : 22).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi sementara PPN hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 410,5 triliun. Jumlah tersebut mencapai 86,6% dari target yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2016 dan

mencapai 98,6% dari outlook pemerintah (Adinda,201). Masih ada selisih, Masih ada yang belum terpungut, Hilangnya PPn kemungkinan terbesar di pengusaha kena pajak yang kecil-kecil. Faktor lainnya banyak. Antara lain bisa karena faktur fiktif (Darussalam,2015).

Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assessmen menjadi *Self Assessment System* , dimana wajib pajak diberikan kepercacaanuntuki menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, Akan tetapi didalam kenyataannya, trdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya (Olvi dan Lintje:2015).

Efektivitas adalah kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapattercapai dengan hasil memuaskan, pengertian efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan (Rahardjo,2011:170). Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak maka yang dimaksud dengan efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak, Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Rizki Yuslam Primerdo:2015).

Adapula Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa). (Anang Mury Kurniawang,2011:111).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem yang belum baik mengakibatkan timbulnya faktur fiktif yang menggerus penerimaan Pajak Pertambahan nilai.
2. Masih banyak Pelaku pajak yang tidak menyetorkan pajaknya sehingga realisasi PPn rendah.
3. *Self Assessment System* yang diukur melalui SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak pada bulan Februari sampai Maret, dan bulan September sampai Oktober tahun 2013 mengalami kenaikan, akan tetapi peningkatan penyampaian SPT Masa PPN tersebut belum diimbangi dengan peningkatan penerimaan PPN.
4. Efektivitas Penagihan Pajak yang diukur melalui Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Majalaya pada bulan Januari sampai Februari, dan Bulan April sampai Mei tahun 2015 mengalami kenaikan, akan tetapi penerbitan surat paksa tersebut belum diimbangi dengan peningkatan penerimaan PPN.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah didefinisikan di atas, maka penjabaran rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan *Self Assessment System* pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Seberapa besar efektivitas penagihan pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Self Assessmnet System dan seberapa Efektif Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh penerapan *Self Assessment System* pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Majalaya.
2. Efektivitas penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Majalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara umum maupun yang terjadi pada KPP Pratama Majalaya.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terkait *Self Assessment System* , Efektivitas Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Halim (2014:7) *Self Assessment System* adalah suatu jenis sistem pemungutan pajak yang melimpahkan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang seharusnya dibayar.

2.1.1.2 Indikator *Self Assessment System*

Indikator dari *Self Assessment System* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:101). Indikator *Self Assessment System* adalah Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

2.1.2 Efektivitas Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Efektivitas Penagihan Pajak

Menurut Anang Mury Kurniawan (2011:111) Penagihan Pajak adalah :

serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

2.1.2.2 Indikator Efektivitas Penagihan Pajak

Menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011: 72) indikator dari Penagihan Pajak yaitu Jumlah Penagihan Pajak dengan surat paksa yang diterbitkan beserta nominalnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying dalam periode 2011-2015.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai menurut Suprianto (2011 : 16) adalah:

"Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lain) barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi".

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Indikator dari Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Ida Ayu Tivon Trisnayanti, 2012) dan (Ika Nursanti, 2013). Indikator Pajak Pertambahan Nilai adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Gunadi, 2007) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap " Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

"Perubahan sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi *Self Assessment System*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak."

2.2.2 Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Restika Purnawardhani dkk (2015) Tindakan penagihan pajak, terutama tindakan penagihan pajak aktif, diharapkan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H1: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

H2: Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah fokus kepada *Self Assessment System* , Efektivitas Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Majalaya tahun 2012-2016. Kemudian dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Bursa Efek Indonesia.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Andi Supangat (2010:9) menjelaskan operasionalisasi variabel sebagai berikut:

> "Operasionalisasi variabel melakukan identifikasi variabel, ada berapa banyak variabel yang digunakan dalam penelitian yang direncanakan, menggunakan skala apa saja dalam setiap variabelnya dan termasuk melakukan pemisahan variabel mana yang akan dijadikan sebagai variabel tidak bebas dan variabel mana yang dijadikan sebagai variabel bebasnya, jika digunakan lebih dari satu variabel dalam sisi pengamatannya".

Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Self Assessment System* dan Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka diperlukan operasionalisasi variabel dengan tujuan untuk memahami keterkaitan antara setiap variabel yang diteliti. *Self Assessment System* (X_1) merupakan variabel bebas *(independent)* bagi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y). Efektivitas Penagihan Pajak (X_2) merupakan variabel bebas

(independent) bagi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y). Sehingga variabel-variabel penelitian ini terdiri dari:

- *Self Assessment System* (X_1)
- Efektivitas Penagihan Pajak (X_2)
- Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data tersebut bersifat kuantitatif mengenai realisasi penerimaan PPN pada KPP Pratama Majalaya periode tahun 2012-2016. Dengan menggunakan data sekunder peneliti memperoleh data atau informasi yang berhubungan mengenai *Self Assessment System* , Efektivitas Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Informasi tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2) Studi Lapangan.

3.3 Populasi, Sampel, dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1. Populasi

Menurut Andi Supangat (2010:3) populasi yaitu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Berdasarkan uraian di atas maka populasi yang digunakan peneliti adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya dari tahun 2012-2016.

3.4.2. Penarikan Sampel

Adapun teknik pengamblian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampel yang digunakan adalah data 5 tahun, Pengaruh penerapan *Self Assessment System*, penagihan pajak pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Majalaya dari tahun 2012-2016.

3.4.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pekayanan Pajak Pratama Majalaya yang beralamat di Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40117.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Februari 2017 sampai dengan Mei 2017.

3.4 Metode Pengujian Data

1. Uji Asumsi Klasik

Danang Sunyoto (2013:87) menjelaskan uji asumsi klasik sebagai berikut:

"Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Beberapa asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi berganda *(Multiple Linear Regression)* sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti".

Berikut ini merupakan tahapan dari uji asumsi klasik menurut Danang Sunyoto (2013, 87-98):

1. **Uji Normalitas**
   Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.Model regresi yang sahih (valid) adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Santosa dan Ashari, 2005:12). Data normal memiliki bentuk seperti lonceng. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov–Smirnov dengan koreksi Lilliefors.
   Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut :
   a. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi data tidak normal
   b. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi data normal
2. **Uji Heteroskedastisitas**
   Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. **Uji Multikolinearitas**
   Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi linear berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independent variabel dimana akan diukur keeratan hubungan antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r).
4. **Uji Autokorelasi**
   Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2)
   - Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW < +2
   - Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2

3.5 Metode Analisis Data

3.6.1 Rancangan Analisis

Analisis yang peneliti gunakan terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif (kualitatif) dan verifikatif (kuantitatif) dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis tersebut menggunakan program *Statistical Product Service Solutions* (SPSS) Versi 23 dengan rincian analisis sebagai berikut:

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana hubungan *Self Assessment System* dan Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kemudian Sugiyono (2012:261) menjelaskan bahwa bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Sumber: Sugiyono (2012:261)

Keterangan:
Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
X_1 = *Self Assessment System*
X_2 = Efektivitas Penagihan Pajak
α = Konstanta Intersep
β_1 = Koefisien regresi variabel *Self Assessment System*
β_2 = Koefisien regresi variabel Efektivitas Penagihan Pajak
ε = Tingkat kesalahan (*error term*)

B. Analisis Koefisien Korelasi

Andi Supangat (2010:339) menjelaskan bahwa koefisien korelasi adalah tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih. Selanjutnya Umi Narimawati (2011:49) menjelaskan bahwa pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. Analisis koefisien korelasi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan masing-masing dari variabel *Self Assessment System* Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Jonathan Sarwono (2011:89) rumus korelasi parsial yaitu sebagai berikut:

$$rx_1y = \frac{rx_1y - rx_2yrx_1x_2}{\sqrt{[1 - rx_2y^2][1 - rx_1x_2{}^2]}}$$

$$rx_2y = \frac{rx_2y - rx_1yrx_1x_2}{\sqrt{[1 - rx_1y^2][1 - rx_1x_2{}^2]}}$$

Sumber: Jonathan Sarwono (2011:89)

Keterangan :
r = Koefisien Korelasi
x = Variabel Bebas (Independen)
y= Variabel Terikat (Dependen)

2. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar variabel *Self Assessment System* dan Efektivitas Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rumus dari korelasi berganda adalah:

$$RY.X_1X_2 = \frac{b_1 \Sigma X_1Y + b_2X_2Y}{\Sigma Y^2}$$

Sumber: Husein Umar (2011:233)

Keterangan:
R = Koefisien korelasi berganda
X_1 = *Self Assessment System*
X_2 = Efektivitas Penagihan Pajak
Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

C. Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Umi Narimawati (2010:50) analisis koefisiensi determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan:
Kd = Koefisien Determinasi
r^2 = Koefisien Korelasi

3.6.2 Metode Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel independen X_1 dan X_2 secara signifikan terhadap variabel

dependen (Y). Menurut Sugiyono (2012:159) hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengujian Secara Parsial

Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t sebagai berikut:

a. Rumus uji t yang digunakan adalah :
Hasilnya bandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 5%.

b. Hipotesis
H_{01} ; ρ = 0, *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
H_{11} ; ρ ≠ 0, *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
H_{02} ; ρ = 0, Efektivitas Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
H_{12} ; ρ ≠ 0, Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

c. Menentukan tingkat signifikan.
Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk)=(n-k-1), untuk menentukan ttabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

d. Menentukan kesimpulan berdasarkan perbandingan t-hitung dengan ttabel. H_0 ditolak apabila thitung< ttabel (α = 0,05).
Kriteria penarikan pengujian: jika menggunakan tingkat kekeliruan (α=0,01) untuk diuji dua pihak, maka criteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:
- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel bebas dan variabel terikat ada hubungannya.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Deskriptif *Self Assessment System*

Penerapan *Self Assessment System* yang diukur melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Penurunan rata-rata jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN hanya terjadi di tahun 2013 dan 2015.

4.1.1.2 Deskriptif Efektivitas Penagihan Pajak

Efektivitas Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan Efektivitas Penagihan Pajak yang diukur dengan surat paksa yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya mengalami kenaikan dan penurunan tiap bulannya.

4.1.1.3 Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dari tahun 2012 hingga tahun 2016 yang mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya mengalami kenaikan dan penurunan tiap bulannya, namun demikian pola data tiap bulan cenderung menunjukan kenaikan karena banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang membayar pajaknya sesuai jatuh tempo yang telah diberitahukan.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, diantaranya uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Untuk menguatkan hasil regresi yang diperoleh dilakukan pengujian asumsi klasik regresi, dimana hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Hasil Pengujian Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov – smirnov nilai probabilitas yang di lihat dari nilai Asymp Sig. adalah sebesar 0,484 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal.

b. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran *tolerance* (α) dan *variance inflation factor* (VIF) jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10 maka VIF = 10. Dari hasil output VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar 1,778 lebih kecil dari 10 dan semua tolerance variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,563 = 56,3% lebih besar dari 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel Penerapan *Self Assessment System* dan Efektivitas Penagihan Pajak.

c. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan variabel independen *Self Assessment System* dan Efektivitas Penagihan Pajak.

d. Hasil Pengujian Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson model regresi pada hasil pengolahan sebesar 1,860 dan lebih besar dari batas atas (dU) 1,651 serta kurang dari 4 – 1,651 (4 – dU), maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil koefisien regresi yang diperoleh dapat ditulis dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan data X dan Y yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y= 1,788E8 + 1,238E7 (X1) + 1,025E7 (X2)

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

X1 = *Self Assessment System*

X2 = Efektivitas Penagihan Pajak

3. Hasil Analisis Koefisien Korelasi

a. Korelasi *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ketika Efektivitas Penagihan Pajak Tidak Berubah

Hubungan antara Penerapan *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ketika Efektivitas Penagihan Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,544, artinya Penerapan *Self Assessment System* memilki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Penerapan *Self Assessment System* maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan begitupun sebaliknya.

b. Korelasi Efektivitas Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ketika *Self Assessment System* Tidak Berubah

Hubungan antara Efektivitas Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ketika Penerapan *Self Assessment System* tidak berubah adalah sebesar 0,534, artinya Efektivitas Penagihan Pajak memilki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Efektivitas Penagihan Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan begitupun sebaliknya.

4. Hasil Analisis Determinasi

a. Koefisien Determinasi Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Koefisien determinasi parsial dari variabel Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Kd = (0,544)2 x 100%
= 29,59%,

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 29,59%, sedangkan sisanya sebesar 70,41% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Koefisien Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Koefisien determinasi parsial dari variabel Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Kd = (0,534)2 x 100%
= 28,51%,

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 28,51%, sedangkan sisanya sebesar 71,49% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.1.3 Uji Hipotesis

4.1.3.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Nilai ttabel sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai thitung > ttabel (2,385 > 2,002) dan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Penerapan *Self Assessment System* sebesar 0,020, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 2% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak Ho. Kesimpulannya, Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

4.1.3.2 Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Nilai ttabel sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai thitung > ttabel (2,168 > 2,002) dan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Efektivitas Penagihan Pajak sebesar 0,034, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 3,4% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak Ho. Kesimpulannya, Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Besar presentase pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 29,59%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai kurang

dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 70,41%% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai seperti, jumlah Pengusaha Kena Pajak, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Produk Domestik Regional Bruto, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yang terjadi di KPP Pratama Majalaya pada bulan Februari sampai Maret, dan bulan September sampai Oktober tahun 2013 dimana *Self Assessment System* yang diukur melalui SPT Masa PPN mengalami kenaikan, akan tetapi penyampaian SPT Masa PPN tersebut belum diimbangi dengan peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan Penerapan *Self Assessment System,* faktor lain tersebut seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Produk Domestik Regional Bruto, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Penelitian mengenai Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh Ida Ayu Trinayati (2015) dan Miftha Anggi Permatasari (2013) menyatakan bahwa Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4.2.2 Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Besar presentase pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 28,51%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 71,49% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai seperti, jumlah Pengusaha Kena Pajak, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Produk Domestik Regional Bruto, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yang terjadi di KPP Pratama Majalaya pada bulan Januari sampai Februari, dan Bulan April sampai Mei tahun 2015 yang menunjukan bahwa Efektivitas Penagihan Pajak yang diukur melalui jumlah surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan, namun peningkatan jumlah surat paksa yang diterbitkan belum diimbangi dengan peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan Efektivitas Penagihan Pajak, faktor lain tersebut seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Produk Domestik Regional Bruto, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Penelitian mengenai Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015), Muhamad Riski Nindar dkk (2014), Ginting (2006) dan Hazra Muda dkk (2015) menyatakan bahwa Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana jika Penerapan *Self Assessment System* yang diukur melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN meningkat maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Meningkatnya Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disebabkan oleh meningkatnya kesadaran Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dipungut dari pelanggan. Sedangkan menurunnya jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disebabkan oleh banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dipungut dari pelanggan.

2. Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana jika jumlah Efektivitas Penagihan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Tingginya jumlah penerbitan surat paksa disebabkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang masih memiliki hutang pajak dan belum melunasinya yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, serta tidak dibayarnya pajak oleh Penanggung Pajak yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak. Sedangkan menurunnya jumlah penerbitan surat paksa karena Pengusaha Kena Pajak sudah melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

5.1. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Saran Praktis :

1. Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, disarankan untuk KPP Pratama Majalaya agar lebih baik lagi dalam melakukan sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para Pengusaha Kena Pajak untuk rutin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui jumlah Efektivitas Penagihan Pajak Efektivitas Penagihan Pajak, maka disarankan KPP Pratama Majalaya dapat melakukan penagihan pajak secara optimal, baik melalui penagihan pasif seperti dengan memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, maupun penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Penagihan pajak yang dilakukan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu diharapkan para Pengusaha Kena Pajak supaya lebih memperhatikan kewajiban perpajakannya, Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat melunasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang belum dibayarkan.

b. Saran Akademis :

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

Anang Mury kurniawan. 2011. *Hukum pajak*. Jakarta: Rinaka Cipta Jaya.

Andi Supangat. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana.

Arikunto, Suharismi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Diaz Priantar. 2012. *Perpajakan Indonesia edisi 2*.Jakarta: Mitra Wacana Media.

Edy Suprianto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Semarang: Graha Ilmu.

Halim Abdul. 2014. *Perpajakan Konsep Aplikaisi, Contoh & Studi Kasus.* Jakarta : Salemba Empat

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* : Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

I Made Wirartha. 2006. *Metodologi Penetilian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*. Ghalia Indonesia

Ilyas, W.B. Burton.2013. *hukum pajak.* Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Imam, Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jonathan Saworno. 2006. *SPSS Teori dan Latihan SPSS Teori dan Latihan*, Bandung : Andi Yogyakarta

M.P. Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan.* Jakarta: Graha Ilmu

Mardiasmo. 2006, *Perpajakan*. Ed Revisi. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.*Yogyakarta: Andi.

Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nur Indriantoro & Bambang Supono. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE

Poerdiminta. 1984. *Kamus riset*. Jakarta: airlangga.

Raharjo, Adimasmitu. 2011. *pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Santosa dan Ashari.2005.*Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS*.Yogyakarta: Andi.

Singgih Santoso.2012.*SPSS Versi Mengolah Data Statistik Secara Profersional*.Jakarta:Elexmedia Komputindo.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan : Teori dan teknis Perhitungan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Prepajakan, konsep, teori dan isu. Kencana*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugeng Wahono. 2012. *Mengurus pajak itu mudah*. Jakarta: PT. Rlex Media.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&*D. Bandung: ALFABETA

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra.

Sujoko Efferin. 2004. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.

Sukardji untung, 2000. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers

Tata Sutabri. 2012. *Analisis Sistem Informasi.* Andi. Yogyakarta

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi*. Bandung

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Undang-undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan

Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi.* Graha Ilmu. Yogyakarta

LAMPIRAN

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Penerapan *Self Assessment System* (X1)	"*Self Assessment System* Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Siti kurnia Rahayu (2010:101)	Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Siti kurnia Rahayu (2010:103)	Rasio
Efektivitas Penagihan Pajak (X2)	Efektivitas adalah kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang	Jumlah Penagihan Pajak dengan surat paksa yang diterbitkan	Rasio

	diinginkan dapattercapai dengan hasil memuaskan . pengertian efektivitas secara umu menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan Rahardjo (2011:170) Penagihan Pajak adalah Seraikaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011: 37)	Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011: 72)	
Penerimaan PPN (Y)	Pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara Sukardji (2012:22)	Besarnya Jumlah Penerimaan PPN Sukardji (2012:22)	Rasio

Tabel 3.5
Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sumber: Sugiyono, 2011:184)

Lampiran – Lampiran SPSS

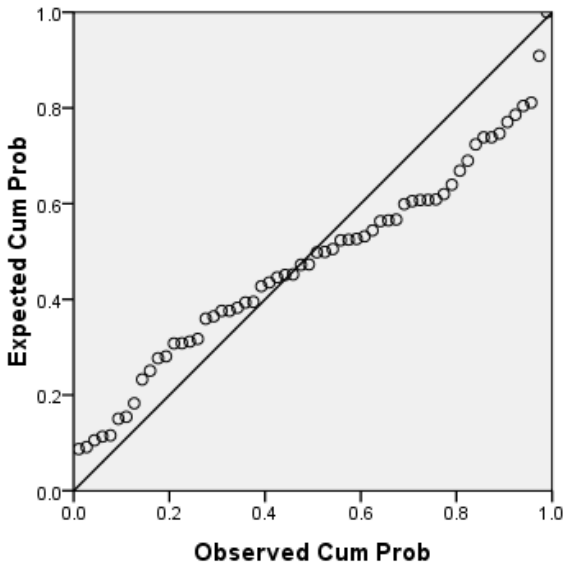
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a]	Mean	-5.0000000E8
	Std. Deviation	3.62447936E9
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.053
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.460
Asymp. Sig. (2-tailed)		.484

a. Test distribution is Normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

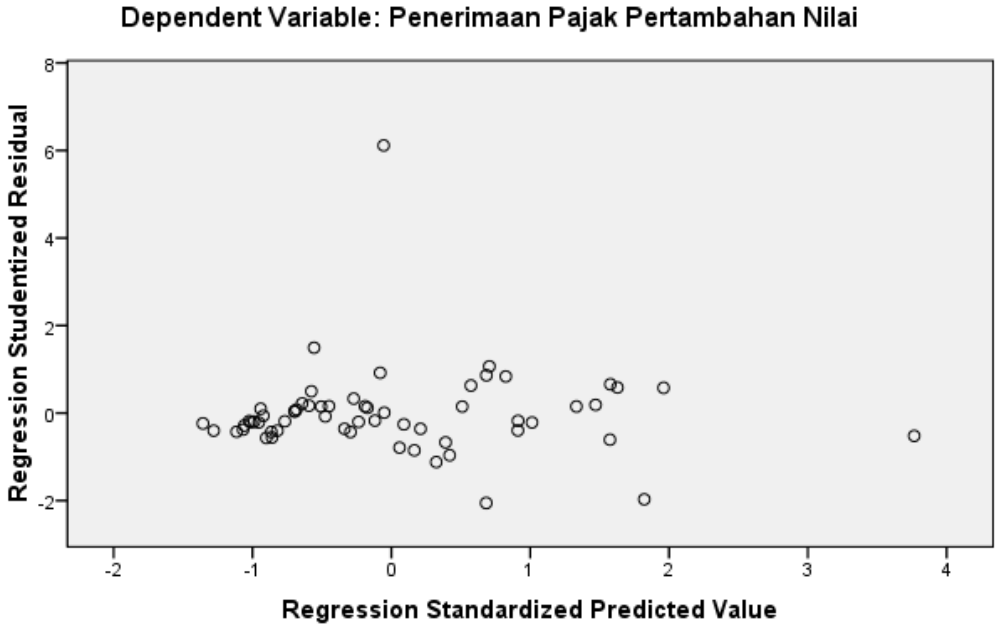


Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penerapan *Self Assessment System*	.563	1.778
	Efektivitas Penagihan Pajak	.563	1.778

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Scatterplot



Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.591[a]	.350	.327	6.23097E9	1.860

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, *Self Assessment System*

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.788E8	4.143E9		.043	.966
	Penerapan *Self Assessment System*	1.238E7	5.190E6	.340	2.385	.020
	Efektivitas Penagihan Pajak	1.025E7	4.727E6	.309	2.168	.034

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Correlations

		Penerapan *Self Assessment System*	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Penerapan *Self Assessment System*	Pearson Correlation	1	.544**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	60	60
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Pearson Correlation	.544**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Efektivitas Penagihan Pajak	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Efektivitas Penagihan Pajak	Pearson Correlation	1	.534**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	60	60
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Pearson Correlation	.534**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).